

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN  
KEMAMPUAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI  
DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN  
ANGGARAN 2015-2017**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh :  
HUGO SURYO PUTRO  
B200130400**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KEMAMPUAN  
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015-2017**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Disusun Oleh:**

**HUGO SURYO PUTRO**

**B 200130400**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen pembimbing



(Eny Kusumawati, S.E., M.M., Ak., CA.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KEMAMPUAN  
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015-2017**

oleh:

**HUGO SURYO PUTRO**  
**B 200130400**

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 4 Juli 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji:

1. Eny Kusumawati, S.E., M.M., Ak., CA (.....) (Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Triyono, S.E., M.Si (.....) (Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Noer Sasongko, S.E., M.Si., Ak. (.....) (Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, M.M.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 Juli 2020

Penulis



**HUGO SURYO PUTRO**  
**B200130400**

# **ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KEMAMPUAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015-2017**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemampuan pengelolaan keuangan daerah Kota Surakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Surakarta tahun 2014-2017. Metode Penelitian ini menggunakan Deskriptif Komparatif analisis untuk mengukur kinerja keuangan daerah dan kemampuan dalam pelaksanaan otonomi daerah Kota Surakarta, yaitu Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Ekonomi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Derajat Desentralisasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Surakarta kurang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan Daerah, Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Otonomi Daerah

## **Abstract**

This study aims to analyze how the ability of financial management in the city of Surakarta in order to support the implementation of regional autonomy. While the data used in this study is the 2014-2017 Surakarta City Budget Realization Report. This research method uses Comparative Descriptive analysis to measure regional financial performance and ability in the implementation of Surakarta's regional autonomy, namely Growth Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Economic Efficiency Ratio, Regional Financial Independence Ratio and Decentralization Degree Ratio. Based on the results of the analysis that has been done, it can be concluded that the government of Surakarta City is less optimizing the Regional Original Revenue.

**Keywords:** Regional Financial Performance, Regional Financial Management Capabilities, Regional Autonomy.

## **1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sampai saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Desentralisasi ini diharapkan menghasilkan dua manfaat nyata. Dua manfaat desentralisasi adalah peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumberdaya produktif (Mardiasmo, 2018: 99). Otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Selain itu, otonomi daerah bertujuan untuk memandirikan daerah dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah.

Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip *Good governance* (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods dan services*). Menurut Halim (2014: 104), Prinsip-prinsip *Good governance* antara lain adalah Akuntabilitas (*accountability*), Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*), Ketaatan pada hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2018: 75). Anggaran sektor publik penting karena memiliki beberapa alasan, antara lain yaitu anggaran sebagai alat bagi pemerintah sebagai pengarah pembangunan, anggaran sangat diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang dan anggaran sebagai alat untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap pembangunan.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi,

mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terdiri dari rasio kemandirian, rasio desentralisasi, rasio efisiensi, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian dapat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD.

Rasio derajat desentralisasi menggambarkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi Kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan pemerintah daerah juga semakin baik.

Rasio efisiensi ekonomi menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan atas pendapatan pada pemerintah daerah. Semakin rendah rasio efisiensi maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Komponen-komponen APBD (PAD, Belanja, Utang dan sebagainya) yang perlu mendapat perhatian sebaiknya melihat terlebih dahulu pertumbuhan komponen-komponen tersebut.

Pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menggambarkan sejauh mana pihak pemerintah pusat yang berperan atas kinerja

pemerintah daerah. Semakin tinggi kemampuan kinerja daerahnya maka semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Tingkat kemampuan dapat dilihat dari perhitungan rasio kemandiriaannya.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Supratiningrum (2015) dengan operasional variabel derajat desentralisasi, Rasio kemandirian daerah, Rasio efektifitas PAD dan Rasio keserasian belanja daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian Sundari dan Supratiningrum (2015) adalah Laporan Realisasi APBD Kota Semarang tahun 2009-2013, Sedangkan peneliti menggunakan sampel Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2017 Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakan yang telah diuraikan, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015-2017”**.

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif Komparatif. Dalam metode deskriptif, yang dilakukan dengan membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

### **2.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif dan merupakan data yang telah diolah oleh obyek yang diteliti. Sedangkan sumber data dari penelitian ini diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 yang dipublikasikan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) dengan format menurut Permendagri no. 13 Tahun 2006. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria dan kebutuhan rumus dari masing-masing rasio yang kemudian diolah secara manual dan



kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan membandingkan tahun-tahun sebelumnya.

### **2.3 Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel berupa rasio-rasio keuangan yang relevan yaitu:

- 1) Rasio Pertumbuhan
- 2) Rasio Kemandirian
- 3) Rasio Efektivitas
- 4) Rasio Efisiensi
- 5) Rasio Derajat Desentralisasi

### **2.4 Metode Analisis**

Metoda Analisis adalah metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, membandingkan, menganalisis dan interpretasi data yang akhirnya pada kesimpulan yang didasarkan pada penelitian data. Hasilnya ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti apabila ditinjau melalui analisis rasio keuangan APBD dengan membuat pemeringkatan diantara tahun-tahun sebelumnya yang diteliti.

Metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, serta rasio derajat desentralisasi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan realisasi anggaran tahun 2015-2017 Kota Surakarta. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan pemda Kota Surakarta selama tahun anggaran 2015-2017.

Adapun hasil dari analisis rasio tersebut, sebagai berikut:

### 3.1 Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*)

Tabel 1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Surakarta  
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	1.525.575.850.952,82	0,00
2015	1.568.482.686.616,07	2,81
2016	1.703.003.847.995,00	8,58
2017	1.803.915.423.158,91	5,93

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020, Lampiran 1.

Berdasarkan tabel IV.1 dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan total Kota Surakarta mengalami kenaikan setiap tahunnya. Lonjakan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 8,58% dari tahun sebelumnya. Pada rincian anggaran tahun 2015, selisih peningkatan terlihat pada pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah sebesar Rp.20.372.597.000 sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penyerapan pajak daerah tahun 2015. Selisish pendapatan antara tahun 2015 dan tahun 2016 terlihat signifikan pada dana perimbangan anggaran tahun 2016 sebesar Rp.1.429.838.719.000 dua kali lipatnya dengan tahun 2015 yang hanya sebesar Rp.772.893.758.000 sesuai dengan KUA-PPAS tahun 2016 tentang pendapatan melalui alokasi dana pemerintah pusat dan provinsi. Sedangkan pada tahun 2017 pemerintah memaksimalkan penyerapan pendapatan melalui pajak daerah, terlihat tertinggi pada pendapatan denda pajak sebesar Rp.1.475.305.884 sesuai dengan KUA-PPAS tahun 2017 tentang pajak daerah. Berarti bisa dikatakan bahwa pemerintah Kota Surakarta dapat meningkatkan pendapatan yang dicapai dari tahun sebelumnya melalui kebijakan yang disusun pada tahun sebelumnya.

Tabel 2. Rasio Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Surakarta  
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	1.479.827.902.466,60	0,00
2015	1.532.527.097.064,00	3,56
2016	1.679.725.208.265,00	9,60
2017	1.767.487.063.196,00	5,22

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020, Lampiran 1.

Berdasarkan dari tabel IV.2 dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan belanja total Kota Surakarta mengalami kenaikan setiap tahunnya. Lonjakan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 9,60% dari tahun sebelumnya. Pada rincian anggaran tahun 2015, terdapat selisih anggaran belanja operasional sebesar Rp.339.224.360.982. Peningkatan dari tahun 2015 dan 2016 terlihat pada belanja modal sebesar Rp.71.701.763.868. Sedangkan tahun 2017, peningkatan terdapat pada belanja bantuan sosial dari Rp.3.153707.303 menjadi Rp.19.934.438.387. Berarti bisa disimpulkan pemerintah Kota Surakarta memfokuskan meningkatkan kualitas dan program pembangunan nasional dalam pelayanan terhadap masyarakat kota surakarta yang tertera pada KUA-PPAS 2017.

Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Surplus/Defisit Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Surplus/Defisit (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	45.747.948.486,19	0,00
2015	35.955.589.552,07	-21,41
2016	22.546.926.834,00	-37,29
2017	35.568.458.842,91	57,75

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020, Lampiran 1.

Berdasarkan dari tabel IV.3 dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan surplus/defisit total Kota Surakarta dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan setiap tahunnya. Lonjakan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar -37,29% dari tahun sebelumnya. Namun mengalami kenaikan pertumbuhan surplus/defisit pada tahun 2017 sebesar 57,75% dari tahun 2016. Perbedaan yang angka besar pada tahun 2014 dengan 2015 dapat dilihat pada belanja daerah sebesar Rp.1.479.827.902.467 dan Rp.1.532.527.097.064 sedangkan selisih pendapatan daerah hanya Rp.42.906.835.666.

Berarti dapat disimpulkan surplus pada tahun 2014 lebih besar dari pada 2015 karena selisih belanja daerah sebesar Rp.52.699.194.597. Surplus pada tahun 2016 lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya dikarenakan selisih anggaran belanja daerah sebesar Rp.147.198.111.201 dibanding dengan selisih pendapatan daerah sebesar Rp.134.521.161.397. Sedangkan perbandingan surplus tahun 2017

mengalami peningkatan dapat dilihat dari selisih pendapatan daerah sebesar Rp.100.911.575.163 sedangkan selisih belanja daerah sebesar Rp.87.761.854.931.

Tabel 4. Rasio Pertumbuhan SiLPa Pemerintah Kota Surakarta  
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	SiLPa (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	187.509.120.270,19	0,00
2015	222.187.449.604,26	18,49
2016	230.633.010.036,26	3,80
2017	226.213.709.289,17	-1,92

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020, Lampiran 1.

Berdasarkan dari tabel IV.4 dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan silpa total Kota Surakarta mengalami naik turun setiap tahunnya. Lonjakan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dari pada tahun 2014 yang sebesar 18,49%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya sisa penghematan belanja antara lain belanja pegawai, belanja modal, dan lain-lainya sebesar Rp.192.741.842.744,37 di tahun 2015. Pada tahun 2016, kenaikan SiLPa hanya sebesar Rp.8.445.560.432 atau 3,80%. Kenaikan ini digunakan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya Rp.13.807.000.000 dari Rp.1.833.000.000 selisih Rp.11.974.000.000. Sedangkan pada tahun 2017, SiLPa mengalami penurunan Rp.4.419.300.747,09 atau 1,92% dari tahun sebelumnya. Dikarenakan pengeluaran pembiayaan yang terdiri penyertaan investasi daerah, pembayaran utang jangka panjang, dan lain-lainya sebesar Rp.40.022.046.090.

Tabel 5. Ringkasan Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	SiLPa
<b>2015</b>	2,81	3,56	-21,41	18,49
<b>2016</b>	8,58	9,60	-37,29	3,80
<b>2017</b>	5,93	5,22	57,75	-1,92

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020, Lampiran 1.

Berdasarkan tabel diatas, rasio pertumbuhan pada tahun 2015, tingkat pendapatan dan belanja meningkat sedikit. Karena baru mengambil kebijakan pemungutan pajak daerah dan belanja modal sehingga mengalami defisit. Namun sisa lebih pembiayaan anggaran meningkat dari tahun sebelumnya yang dapat

mengurangi defisit. Pada Tahun 2016, Meningkatnya pendapatan dan dibarengi meningkatnya belanja daerah. Pendapatan transfer atau bantuan dari pemerintah pusat berkontribusi dalam pendapatan dan digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan lainnya. Sedangkan pada tahun 2017, keberhasilan pemerintah daerah dalam penyerapan pajak daerah sehingga mengurangi bantuan dari pemerintah pusat. Namun sisa lebih pembiayaan anggaran menurun dikarenakan digunakan untuk pembiayaan investasi daerah.

### 3.2 Rasio Efektivitas

Tabel 6. Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Surakarta  
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2015	372.798.426.790,07	361.019.672.000,00	103	Efektif
2016	425.502.779.064,00	394.200.858.000,00	108	Efektif
2017	527.538.846.221,91	492.503.909.101,00	107	Efektif

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020, Lampiran 2.

Berdasarkan dari tabel VI dapat diketahui bahwa efektivitas kinerja keuangan pada BPPKAD Kota Surakarta mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 103% pada tahun 2015 menjadi 108% pada tahun 2016. Pada tahun 2015 merupakan tingkat rasio efektivitas terendah dari tahun lainnya. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kota Surakarta sudah efektif dalam mengelola pendapatan asli daerah karena nilai rasio efektivitas menunjukkan angka lebih dari 100%. Pada tahun 2015, selisih antara realisasi PAD dengan potensi riil daerah sebesar Rp.11.778.754.790,07. Kenaikan ini dikarenakan rincian pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga naik. Pada tahun 2016, selisih antara realisasi PAD dengan potensi riil daerah sebesar Rp.31.301.921.064. Kenaikan ini dikarenakan rincian lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah naik menjadi Rp.106.508.014.539. Sedangkan pada tahun 2017, selisih antara realisasi PAD dengan potensi riil daerah sebesar Rp.35.034.937.120,91. Kenaikan ini dikarenakan pendapatan pajak daerah naik sebesar Rp.22.781.708.159.

### 3.3 Rasio Efisiensi Ekonomi

Tabel 7. Rasio Efisiensi Ekonomi Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2015	1.532.527.097.064,00	1.568.482.686.616,07	98	Efisien
2016	1.679.725.208.265,00	1.703.003.847.995,00	99	Efisien
2017	1.767.487.063.196,00	1.803.915.423.158,91	98	Efisien

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020, Lampiran 2.

Berdasarkan dari tabel VII dapat diketahui bahwa rasio efisien pendapatan Kota Surakarta dari tahun 2015-2017 yakni sebesar 98%, 99%, dan 98%. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan Kota Surakarta tergolong efisien karena berada pada interval kurang dari 100%. Pada tahun 2015, selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja sebesar Rp.35.955.589.522. Lalu pada tahun 2016, selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja sebesar Rp.23.278.639.730. Sedangkan pada tahun 2017, selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja sebesar Rp.36.428.359.962.

### 3.4 Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 8. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Keterangan
2015	361.019.672.000,00	1.568.482.686.616,07	23	Kurang Baik
2016	394.200.858.000,00	1.703.003.847.995,00	23	Kurang Baik
2017	492.503.909.101,00	1.803.915.423.158,91	27	Baik

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020, Lampiran 3.

Berdasarkan dari tabel VIII dapat diketahui bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Surakarta pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 23% dikategorikan kurang baik dalam melaksanakan desentralisasi, karena rasio derajat desentralisasinya menunjukkan angka di bawah 25%. Sedangkan pada tahun 2017 rasio desentralisasinya menunjukkan angka 27% yang dikategorikan baik dalam melaksanakan desentralisasi. Dapat disimpulkan bahwa Kota Surakarta perlu meningkatkan PAD sebagai kontribusi penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

### 3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 9. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Keterangan
2015	372.798.426.790,07	439.955.840.361,00	85	Delegatif
2016	425.502.779.064,00	1.276.057.314.182,00	33	Konsultatif
2017	507.538.846.221,91	1.273.667.576.937,00	41	Konsultatif

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020, Lampiran 3.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan BPPKAD Kota Surakarta dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah berpola konsultatif dan hanya pada tahun 2015 rasio kemandirian keuangan daerah yang tinggi berpola delegatif. Artinya, peranan pemerintah pusat mulai berkurang karena BPPKAD Kota Surakarta sedikit mampu untuk melakukan urusan otonominya.

Tabel 10. Ringkasan Rasio Efektivitas, Efisiensi, Derajat Desentralisasi dan Kemandirian

Tahun	Rasio Efektivitas		Rasio Efisiensi		Rasio Derajat Desentralisasi		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	
	Rasio	Ket.	Rasio	Ket.	Rasio	Ket.	Rasio	Ket.
2015	103%	Efektif	98%	Efisien	23%	Kurang Baik	85%	Delegatif
2016	108%	Efektif	99%	Efisien	23%	Baik	33%	Konsultatif
2017	107%	Efektif	98%	Efisien	27%		41%	Konsultatif

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020, Lampiran 2 dan 3.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan kinerja keuangan daerah pada tahun 2015-2017 adalah efektif dan efisien. Namun kurang memaksimalkan pendapatan asli daerah dan mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2017 karena keberhasilan dalam penyerapan pajak daerah dan mengurangi bantuan dari pemerintah pusat sehingga semakin membaik dalam penyerapan pendapatan asli daerah.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Rasio pertumbuhan untuk tahun 2015-2017 mengalami naik turun pertumbuhan dari berbagai aspek yang menuju lebih baik. Pada aspek pertumbuhan pendapatan dapat diketahui mengalami kenaikan setiap tahun sebesar 2,81%, 8,58%, 5,93%. Pada aspek pertumbuhan belanja dapat diketahui mengalami kenaikan setiap tahun sebesar 3,56%, 9,60%, 5,22%. Pada aspek pertumbuhan surplus/defisit diketahui mengalami naik turun surplus sebesar -21,41%, -37,29, 57,75%. Pada aspek pertumbuhan SiLPA dapat diketahui mengalami penurunan setiap tahun sebesar 18,49%, 3,80%, -1,92%
- 2) Rasio efektivitas PAD dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk rata-rata rasio selama tahun 2015-2017 yaitu rasio efektivitas PAD  $\geq 100\%$ , berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif itu menunjukkan penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
- 3) Rasio efisien keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata rasio selama tahun 2015-2017 yaitu rasio efisien keuangan daerah  $\leq 100\%$ , berarti kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah sangat efisien dalam merealisasikan pendapatan dan belanja.
- 4) Rasio derajat desentralisasi dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata rasio selama tahun 2015-2017 yaitu rasio derajat desentralisasi dibawah 25%, berarti kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD dari total penerimaan



masih kurang baik meski pada tahun 2017 angka menunjukkan 27% yang berarti adanya upaya pemerintah daerah meningkatkan PAD.

- 5) Rasio Kemandirian dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata rasio selama tahun 2015-2017 yaitu rasio kemandirian antara 25% - 50% (konsultatif), berarti kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat. Karena campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang maka dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang sedikit mampu untuk melaksanakan urusan otonominya.

#### **4.2 Saran**

Pemerintah daerah Kota Surakarta diharapkan dapat meningkatkan PAD agar tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat. Mengoptimalkan potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya melalui pajak dan retribusi dll.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Mardiasmo., 2018, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Arifin, Atwal., 2012, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota se ex Karesidenan Surakarta”.
- Halim, Abdul & Kusufi, Syam, Muhammad., 2014, “Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik”, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Kaho, Josef Riwu. 2012, “Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”, Yogyakarta: Center for politics and goverment (PolGov) fisipol UGM
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- Putra, Windhu. 2018, Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah, Depok: Rajawali pers.
- Haryani. 2016. “Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen”. Jurnal Kebangsaan, Vol. 5 No. 9 Januari 2016 ISSN: 2089-5917.
- Hanik, Fitri Umi dan Tutik Dwi Karyanti. 2014. “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)”.  
JABPI VOL. 22, NO 2, JULI 2014 ISSN: 1411.6871.

- Latuny, Elsjamina M. 2016. “Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat)”. Vol. X, No.1, Mei 2016 ISSN: 1978-3612.
- Wonda, Welio. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua”. Jurnal EMBA, Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 192-200 ISSN 2303-1174.
- Pauwah, Ivone, dan Silvy Mandey. 2014. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara”. Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 001-012 ISSN 2303-1174.
- Sundari dan Rr. Suprانتiningrum. 2015. “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian daerah di Era Otonomi daerah (Studi kasus Kota Semarang tahun 2009-2013)”. MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN, Vol. 30 No. 1 Januari 2015 ISSN : 085-1442.
- Saputra, Boni dan Riki Fernando. 2017. “Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman”. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, Vol.5 | No.3 | 2017 ISSN:2338-1507.
- Kusumadewi, Wahidah Niken dan Ventje Ilat. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014”. Jurnal EMBA, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 634-644 ISSN 2303-1174.
- Rahmawati, Ni Ketut Erna dan I Wayan Putra. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3.Juni (2016): 1767-1795 ISSN: 2302-8556.
- Tamboto, Morasa, dan Lidia Mawikere. 2014. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara”. Jurnal EMBA, Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 755-767 ISSN 2303-1174